

**PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN, KEJELASAN  
SASARAN ANGGARAN, AKUNTABILITAS PUBLIK DAN KAPASITAS  
INDIVIDU TERHADAP KINERJA OPD  
(Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Surabaya)**

**Satria Wahyu Darmawan**  
*13satriawahyu@gmail.com*  
**Anang Subardjo**

**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya**

**ABSTRACT**

*This research aimed to examine the effect of budgeting participation, budget goal clarity, public accountant, and individual capacity on the performance of local government official. While, the research was quantitative. Moreover, the population was Surabaya Regional Working Unit. Furthermore, the sampling collection technique used purposive sampling; which the sample was based on considered criteria. The research used survey as the data collection technique. In line with, some questionnaires were given to the respondents. In addition, the data were primary. For the data analysis technique, it used multiple linear regression with SPSS (Statistical Product and Services Solution) 20.0. The research result concluded budgeting participation had positive effect on the performance of local government official. Likewise, budget goal clarity had positive effect on the performance of local government official. Besides, public accountant had positive effect on the performance of local government official. As well as, individual capacity had positive effect on the performance of local government official.*

*Keyword: participation, clarity, accountant, capacity, performance of official*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik, dan kapasitas individu terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah Kota Surabaya. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode survei. Data yang digunakan adalah data primer berupa kuesioner yang dibagikan kepada responden. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan alat bantu aplikasi SPSS (*Statistical Product and Services Solutions*) versi 20.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik, kapasitas individu berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

Kata Kunci: partisipasi, kejelasan, akuntabilitas, kapasitas, kinerja

**PENDAHULUAN**

Perubahan dalam bidang politik di Indonesia saat ini mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan negara dan pembangunan, sehingga pemerintah memberikan kebebasan dan keluasaan kepada pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah melalui otonomi daerah. Untuk dapat menciptakan daerah yang lebih mandiri dan pembangunan nasional supaya daerah tersebut lebih maju, maka perlu dilakukan otonomi daerah yang berarti hal, kewajiban dan kewenangan suatu daerah untuk dapat mengatur dan mengurus daerahnya sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat sehingga pembangunan nasional lebih maju.

Kinerja instansi pemerintah kini lebih banyak dapat sorotan mengenai pertanggungjawaban yang telah dipercayakan, karena masyarakat mulai mempertanyakan manfaat dan hak yang seharusnya mereka peroleh atas pelayanan instansi pemerintah. Pemerintah dituntut dapat lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan administrasi

pemerintah khususnya yang berhubungan dengan anggaran. Kinerja sektor publik sebagian besar dipengaruhi oleh kinerja aparat atau manajerial karena itu menjadi hal penting bagi suatu organisasi. Dalam kinerja terdapat gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program atau program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, serta visi dan misi dalam organisasi yang tertuang dalam suatu perencanaan strategis. Kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang sebelumnya telah ditetapkan. Untuk dapat mengetahui apakah kinerja tersebut efektif atau tidak efektif harus dilakukan penelitian terhadap anggaran.

Salah satu faktor utama yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah perencanaan dan penganggaran. Karena belum optimalnya sebuah proses perencanaan dan penganggaran yang telah mengabaikan prinsip-prinsip dalam hal pengelolaan keuangan daerah dengan baik akan mengakibatkan penerapan yang rendah sehingga memunculkan masalah pengelolaan keuangan daerah yang tidak baik, Nurhalimah (2013). Untuk dapat mengantisipasi permasalahan seperti ini, Pemerintah Daerah Kota Surabaya harus meningkatkan kinerja dan akuntabilitas demi terwujudnya *Good Governance*. *Good Governance* merupakan tujuan utama dari sektor publik. Karena dalam mewujudkan *Good Governance*, salah satu unsur yang harus terpenuhi dengan adanya komitmen bersama dari semua anggota dalam satuan organisasi/ lembaga untuk mewujudkan fungsi dan tugas pemerintahan yang bersih, berkualitas dan mengedepankan unsur-unsur efektivitas, efisiensi dan ekonomis dalam memberikan layanan prima kepada publik. Dalam penerapan *Good Governance* atau pengelolaan pemerintah supaya lebih baik, maka akuntabilitas adalah salah satu faktor yang mempengaruhinya.

Anggaran dipandang sebagai alat perencanaan dan pengendalian yang sangat penting, sehingga proses penyusunan anggaran merupakan aspek penting dalam pencapaian keberhasilan dari suatu organisasi. Deddi (2008) dalam Wulandari (2013) menyatakan bahwa kegunaan anggaran adalah sebagai alat penilai kinerja, artinya anggaran merupakan mata tunai yang berkesinambungan dengan proses penganggaran, dimana suatu ukuran yang bisa menjadi patokan apakah suatu bagian/unit kerja telah memenuhi target, baik berupa terlaksananya aktivitas maupun terpenuhinya efisien. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap kemampuan manajemen untuk mencapai tujuan organisasinya. Oleh sebab itu, pada akhirnya akan kembali menjadi dampak pada kinerja manajerial. Karakteristik sistem penganggaran adalah kejelasan sasaran anggaran. Dengan adanya sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan individu untuk menyusun target - target anggaran. Sehingga, sasaran anggaran harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggung jawab untuk menyusun dan melaksanakannya.

Selain partisipasi penyusunan anggaran faktor lain untuk mencapai kinerja pemerintah yang baik yaitu kejelasan sasaran anggaran juga dapat meningkatkan kinerja pemerintah. Menurut Asrini (2017) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian anggaran tersebut. Kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada aparat pemerintah untuk menyusun anggaran yang sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah. Pegawai akan memiliki informasi yang cukup untuk memprediksi secara tepat sehingga dengan adanya kejelasan sasaran anggaran yang jelas, pegawai pelaksana anggaran juga akan terbantu dalam terealisasinya secara langsung, dan akan memudahkan pemerintah daerah untuk menyusun target anggaran yang akan mempengaruhi terhadap kinerja perangkat daerah. Penyebab tidak efektif dan efisiensinya anggaran salah satunya dikarenakan ketidakjelasan sasaran anggaran yang mengakibatkan pegawai pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam penyusunan target-target anggaran.

Individu yang berkualitas adalah individu yang memiliki pengetahuan. Terkait dalam proses penganggaran, maka individu yang memiliki cukup pengetahuan akan mengetahui untuk mengalokasi sumber daya secara optimal, dengan demikian dapat memperkecil

kesenjangan anggaran. Kapasitas atau kemampuan individu adalah kesanggupan atau kecakapan yang berarti bahwa seseorang yang memimiliki kecakapan atau kesanggupan untuk mengerjakan sesuatu yang diwujudkan melalui tindakannya untuk meningkatkan produktifitas kerja. Kondisi ini sifatnya sangat subyektif karena menyangkut motif individu atau perasaan seseorang, artinya seseorang bisa merasakan sesuatu hal yang menguntungkan atau tidak memberikan kepuasan sesuai dengan keadaan emosi seseorang mempersiapkan kondisi kerja yang ada.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik dan kapasitas individu terhadap kinerja organisasi perangkat daerah. Berdasarkan uraian pada latar belakang atas, peneliti menentukan perumusan masalah mengenai : (1) Apakah terdapat pengaruh partipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja OPD?; (2) Apakah terdapat pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja OPD?; (3) Apakah terdapat pengaruh akuntabilitas publik terhadap kinerja OPD?; (4) Apakah terdapat pengaruh kapasitas individu terhadap kinerja OPD? Sedangkan tujuan penelitian adalah : (1) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh partipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja OPD; (2) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja OPD; (3) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh akuntabilitas publik terhadap kinerja OPD; (4) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kapasitas individu terhadap kinerja OPD

## TINJAUAN TEORITIS

### Teori Keagenan (*Agency Theory*)

*Agency theory* pertama kali diungkapkan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang mengatakan bahawa teori keagenan merupakan teori ketidaksamaan kepentingan antara prinsipal dan agen. *Agency theory* didalamnya terdapat hubungan agensi yang muncul ketika satu orang (prinsipal) mempekerjakan orang lain (agen) untuk memberikan jasa dan melimpahkan wewenang pengambilan keputusan kepada agen.

Teori agensi muncul dimana individu-individu bertindak untuk kepentingan diri mereka sendiri. Teori agensi mengarah pada hubungan agensi pemilik (*principal*) yang memberi mandat pada pekerja (*agent*) serta menjelaskan tentang hubungan agensi dengan menggunakan metamorfosa dari kontrak. Teori agensi bertujuan untuk menyelesaikan masalah : (1) masalah agensi yang muncul ketika adanya konflik tujuan antara prinsipal dan agen serta kesulitan prinsipal melakukan verifikasi pekerja agen; (2) masalah pembagian resiko yang muncul ketika partisipal dan agen memiliki perilaku yang berbeda terhadap resiko. Masalah karena perbedaan tindakan karena adanya perbedaan perfensi resiko (Ikhsan dan Suprasto, 2008: 76).

### Anggaran

Anggaran adalah alat utama kebijakan fiskal. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang akan di capai oleh suatu organisasi dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial (Mardiasmo, 2009). Berdasarkan PP No. 71 tahun 2010, anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Anggaran sektor publik adalah rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter.

Dalam organisasi sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengolahan dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Setiap kegiatan atau program kerja bagi organisasi baik organisasi profit ataupun non profit pasti membutuhkan anggaran dalam berlangsungnya organisasi tersebut. Bahkan dalam organisasi pemerintah,

anggaran adalah hal yang terpenting dalam melaksanakan pemerintahannya. Sumber anggaran dana pemerintah biasanya di dapat dari pendapatan yang diberikan masyarakat seperti pajak, retribusi dan lain-lain. Kemudian anggaran tersebut dikelola dan diperuntukan mensejahterakan masyarakat melalui program pemerintah dan segala aktivitas pelayanan masyarakat.

Mardiasmo (2009) menjelaskan fungsi-fungsi anggaran dalam 8 aspek: (1) Sebagai alat perencanaan; (2) Anggaran sebagai alat Pengendalian (*control tool*); (3) Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal; (4) Anggaran sebagai alat politik; (5) Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi; (6) Anggaran sebagai alat penilaian kinerja; (7) Anggaran sebagai alat motivasi. ; (8) Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik. Anggaran pemerintah daerah harus bisa menjadi tolak ukur pencapaian kinerja yang diharapkan, sehingga perencanaan anggaran pemerintah daerah harus bisa menggambarkan sasaran kinerja secara jelas.

Proses penyusunan anggaran pada dasarnya merupakan proses penetapan peran, dimana setiap manajer dalam organisasi diberi peran untuk melaksanakan kegiatan dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam anggaran. Proses penyusunan anggaran dapat dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan yaitu: (1) *Top-Down Approach* (pendekatan dari atas ke bawah) Dalam pendekatan ini, proses penyusunan anggaran dimulai dari manajer puncak. Anggaran disusun dan ditetapkan oleh pimpinan dan anggaran harus dilaksanakan bawahan. (2) *Bottom-Up Approach* (pendekatan dari bawah ke atas) Dalam pendekatan ini, anggaran disusun berdasarkan hasil keputusan karyawan. Anggaran disusun mulai dari bawahan sampai ke atasan. Bawahan diserahkan sepenuhnya untuk menyusun anggaran yang akan dicapai di masa mendatang.

### **Partisipasi Penyusunan Anggaran**

Penyusunan anggaran pada pemerintah daerah merupakan bagian terpenting dari aktivitas dalam perencanaan dan pengendalian, maka dari itu untuk mendapatkan anggaran, mengalokasikan serta mengawasi anggaran diperlukan proses serta sistem yang mengarah pada partisipasi anggaran dan tidak berdasarkan pada kepentingan individu yang dapat menyebabkan berbagai persoalan disaat anggaran dialokasikan ke unit kerja yang ada, sebab itu informasi pada pemerintah daerah dapat berupa informasi yang terdapat pada tiap-tiap dinas.

Menurut Ikhsan dan Ishak (2005), suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh kedua belah pihak atau lebih mempunyai dampak masa depan bagi pembuat dan penerima keputusan dan mengarah pada seberapa besar tingkat keterlibatan aparat pemerintah daerah dalam penyusunan anggaran daerah serta pelaksanaannya untuk anggaran tersebut yang dinamakan sebagai partisipasi.

Oleh karena itu, dalam proses penyusunan anggaran partisipasi dianggap sebagai aspek yang penting dalam penyampaian keberhasilan disuatu organisasi. Dengan kata lain karyawan dan manajer tingkat bawah memiliki andil suara dan ikut dalam proses penyusunan manajemen. Dan dengan adanya partisipasi anggaran diharapkan kinerja apatur pemerintah dapat meningkatkan hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa etika suatu tujuan atau standart yang dirancang secara partisipatif disetujui, maka para pimpinan suatu organisasi pemerintah akan bersungguh-sungguh dalam tujuan atau standar yang ditetapkan dan memiliki rasa tanggung jawab pribadi untuk mencapainya karena ikut serta dalam penyusunan anggaran (Milani,1997 dalam Darlis 2002).

Partisipasi anggaran secara terperinci mempunyai 4 indikator (Bangun, 2009), yaitu: (1) Melibatkan bawahan dalam penyusunan anggaran; (2) Memberi kesempatan bawahan ikut dalam penyusunan anggaran; (3) Memberikan informasi dalam penyusunan anggaran; (4) Kontribusi bawahan dalam anggaran OPD.

Proses penyusunan anggaran bisa juga menetapkan siapa yang akan berperan dalam pelaksanaan sebagian kegiatan dalam pencapaian anggaran dan ditetapkan. Peran tersebut menuntut manajer untuk bisa mengarahkan bawahan agar lebih bekerja dengan maksimal guna dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

### **Kejelasan Sasaran Anggaran**

Kejelasan sasaran menurut Kenis, 1979 (Putra, 2013) mengatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung-jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Oleh karena itu sasaran anggaran pemerintah daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggung jawab melaksanakannya.

Locke (1968) dalam Kenis (1979) menyatakan bahwa penetapan tujuan spesifik akan lebih produktif. Hal ini akan mendorong karyawan atau staf untuk melakukan yang terbaik bagi pencapaian tujuan yang dihendaki sehingga berimplikasi pada peningkatan kinerja. Kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada aparat untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja. Hal ini menyebabkan pelaksana anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan.

Menurut Locke dan Latham, 1984 (Putra, 2013:6), agar pengukuran sasaran efektif ada 7 indikator yang diperlukan: (1) Tujuan, membuat secara terperinci tujuan umum tugas-tugas yang harus dikerjakan. (2) Kinerja, menetapkan kinerja dalam bentuk pertanyaan yang diukur. (3) Standar, menetapkan standar atau target yang ingin dicapai. (4) Jangka Waktu, menetapkan jangka waktu yang dibutuhkan untuk pengerjaan. (5) Sasaran Prioritas, menetapkan sasaran yang prioritas. (6) Tingkat Kesulitan, menetapkan sasaran berdasarkan tingkat kesulitan dan pentingnya. (7) Koordinasi, menetapkan kebutuhan koordinasi.

Kejelasan sasaran akan membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang ditetapkan, dimana dengan mengetahui sasaran anggaran tingkat kinerja dapat tercapai. Keterlibatan individu akan memahami sasaran yang akan dicapai oleh anggaran tersebut, serta bagaimana akan mencapainya dengan menggunakan sumber yang ada, selanjutnya target-target anggaran yang disusun akan sesuai dengan yang akan dicapai.

### **Akuntabilitas Publik**

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Sedangkan pengertian dari akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang pihak amanah untuk pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan serta mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya terhadap pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002).

Oleh karena itu partisipasi dalam proses penyusunan anggaran dianggap sebagian aspek penting dalam pencapaian keberhasilan dari suatu organisasi. Dengan kata lain, pekerja dan manajer tingkat bawah memiliki suara dan ikut andil dalam proses manajemen. Dengan adanya partisipasi anggaran diharapkan kinerja para aparat pemerintah dapat meningkat. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa ketika suatu tujuan atau standar yang dirancang secara partisipatif disetujui, maka para pimpinan organisasi pemerintahan akan bersungguh-sungguh dalam tujuan atau standar yang ditetapkan dan memiliki rasa tanggung jawab pribadi untuk mencapainya karena ikut serta terlibat dalam penyusunannya, Milani 1997 (dalam Darlis, 2002).

Melalui proses negosiasi dan banyak diskusi anggaran yang terjadi dalam rapat, manajer akan menyadari masalah dari rekan-rekannya di unit organisasi lainnya dan memiliki pemahaman yang lebih baik atas saling ketergantungan antar-departemen. Dengan demikian, banyak masalah potensial yang berkaitan dengan anggaran dapat dihindari.

Partisipasi penganggaran secara terperinci terdiri dari 4 indikator (Bangun, 2009), yaitu: (1) Melibatkan bawahan dalam penyusunan anggaran. (2) Memberi kesempatan bawahan ikut dalam penyusunan anggaran. (3) Memberikan informasi dalam penyusunan anggaran. (4) Kontribusi bawahan dalam anggaran OPD. Proses penyusunan anggaran harus bisa menetapkan siapa yang akan berperan dalam melaksanakan sebagian kegiatan pencapaian sasaran anggaran dan ditetapkan. Peran tersebut menuntut manajer untuk bisa mengarahkan bawahan agar bekerja dengan maksimal guna mencapai tujuan yang ditetapkan.

### **Kapasitas Individu**

Kapasitas individu terbentuk dari proses pendidikan secara umum baik melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman seseorang. Pendidikan dan pelatihan merupakan investasi sumber daya manusia yang dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan, sehingga dapat meningkatkan kinerja. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan formal yang telah di tempuhnya seseorang selama di bangku sekolah atau perguruan tinggi.

Sari (2006) menyatakan bahwa kapasitas individu dapat dinilai dari tiga indikator yaitu: (1) pelatihan. (2) Pengalaman. (3) Pendidikan. Kurikulum pendidikan yang baku dan waktu yang relatif lama biasanya dapat membekali seseorang dengan dasar-dasar pengetahuan umum. Pelatihan merupakan pendidikan yang diperoleh karyawan di instansi terkait dengan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan jabatan atau dunia kerja. Pelatihan biasanya dilakukan dalam waktu yang relatif singkat dengan tujuan untuk membekali seseorang dengan keterampilan kerja, sedangkan pengalaman ialah pendidikan yang diperoleh seseorang selama bekerja di instansinya. Pengalaman seorang pegawai berkaitan dengan kondisi psikologis seseorang yang sudah handal dalam melaksanakan pekerjaan karena pengalamannya dalam beberapa tahun (Simanjuntak, 2011).

### **Penelitian Terdahulu**

Putra (2009) melakukan penelitian secara empiris dan menganalisis pengaruh akuntabilitas publik dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah Kota Padang. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif antara akuntabilitas publik dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah Kota Padang.

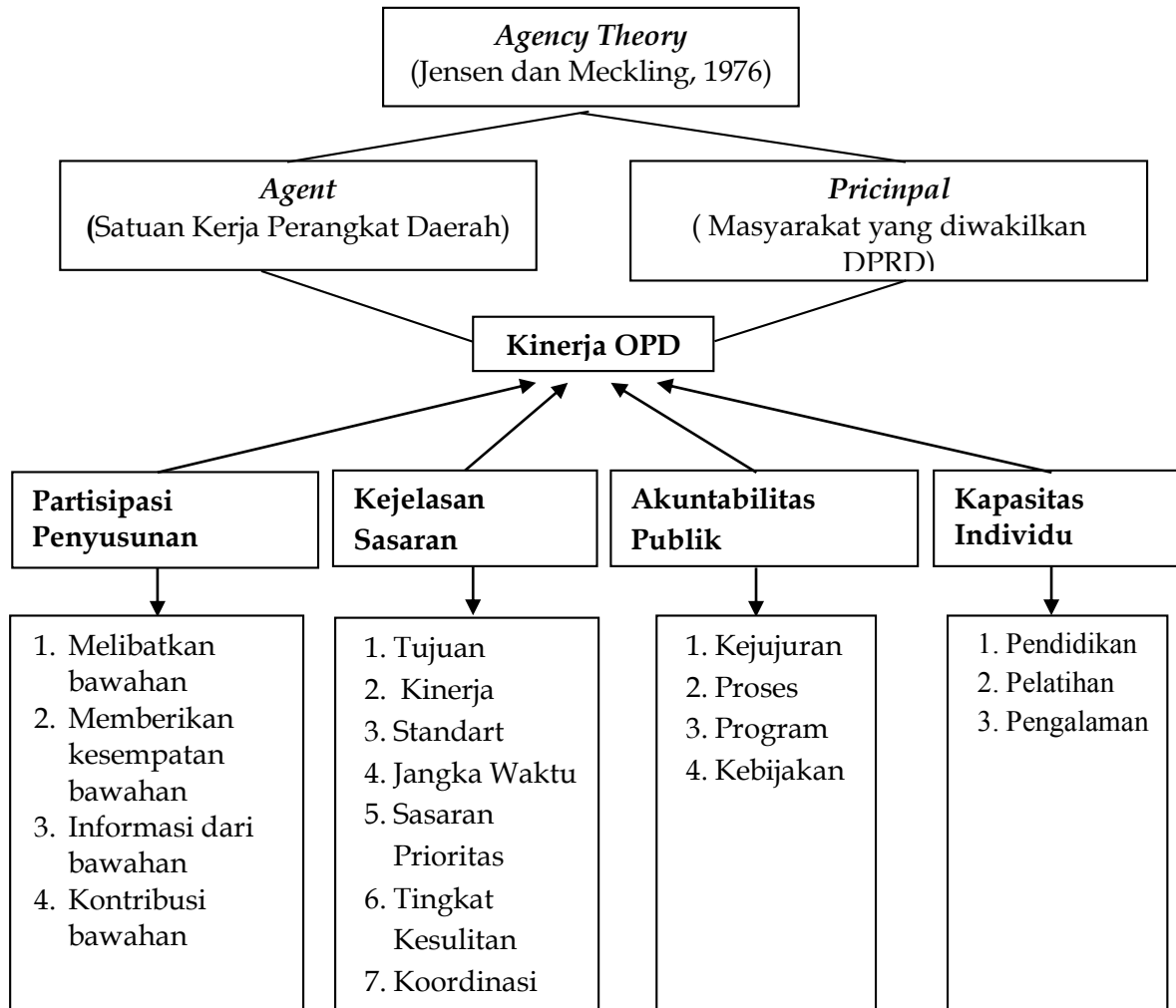
Nurhalimah (2003) menguji tentang pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja aparatur perangkat daerah pemerintah Aceh. Hasil dari penelitian ini menunjukkan partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparatur perangkat daerah, sedangkan kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja aparatur perangkat daerah di pemerintah Aceh.

Asrini (2017) menguji tentang pengaruh akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran, dan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja OPD dipemerintah daerah kota palu. Hasil penelitian ini adalah akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap kinerja OPD, kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja OPD, dan penyusunan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja OPD di pemerintah Kota Palu

### **Rerangka Pemikiran**

Kinerja instansi pemerintah adalah suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan, program, kebijakan dalam mewujudkan sasaran anggaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam strategi *planning* suatu organisasi sektor publik. Dalam proses pencapaian kinerja yang baik tentunya pemerintah perlu memperhatikan masukan, proses, keluaran hasil, manfaat dan dampak. Apabila kinerja pemerintah baik maka masyarakat akan menilai bahwa pemerintah telah menjalankan transparansi dan akuntabilitas publik. Baik buruknya kinerja pemerintah daerah di tentukan oleh beberapa faktor sehingga mendorong peneliti melakukan penelitian ini untuk mengetahui apakah kinerja instansi

pemerintah dipengaruhi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik dan kapasitas individu. Berikut ini adalah rerangka pemikiran:



Gambar 1  
Rerangka Pemikiran

### Pengembangan Hipotesis

#### Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja OPD

Partisipasi penyusunan anggaran dapat diartikan sebagai proses pengambilan keputusan dan keikutsertaan dua orang atau lebih dalam menyusun anggaran secara bersamaan. Partisipasi anggaran sektor publik menunjukkan luasnya sebuah partisipasi bagi aparat pemerintah daerah dalam memahami anggaran yang diusulkan oleh unit kerjanya serta pengaruh pusat pertanggungjawaban anggaran. Partisipasi suatu tingkat manajer atau manajer publik yang dimulai dari proses penyusunan anggaran akan membawa pengaruh positif dalam pencapaian tujuan pemerintah.

Semakin besar keterlibatan aparat pemerintah dalam menyusun anggaran yang dapat menghasilkan keputusan dalam OPD, maka dapat menimbulkan rasa tanggung jawab yang tinggi untuk mensukseskan keputusan tersebut. Hal ini sangat penting karena aparat pemerintah daerah akan merasa produktif dan puas terhadap pekerjaannya sehingga memungkinkan munculnya perasaan berprestasi yang akan meningkatkan kinerjanya.

**H<sub>1</sub> : Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja OPD**

### **Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja OPD**

Anggaran sebagai rencana kerja pemerintah daerah memiliki desain teknis pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan daerah. Jika kualitas suatu daerah rendah, maka kualitas fungsi – fungsi pemerintah cenderung lemah, begitu sebaliknya jika kualitas suatu daerah itu tinggi maka kualitas fungsi-fungsi pemerintah cenderung kuat. Anggaran daerah harus menyajikan informasi mengenai kinerja yang dicapai. Anggaran juga dapat menjadi tolak ukur dalam pencapaian kinerja yang diharapkan, sehingga perencanaan anggaran harus bisa menggambarkan sasaran kerja yang jelas.

Kejelasan sasaran anggaran dapat membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang dimana dengan mengetahui susunan anggaran yang jelas tingkat kerja yang akan tercapai. Pencapaian ini berkaitan dengan adanya motivasi, sebab dengan adanya motivasi yang tinggi akan membantu pegawai dalam mencapai sesuatu yang diharapkan.

**H<sub>2</sub>: Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja OPD**

### **Pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja OPD**

Akuntabilitas publik adalah memiliki bentuk pertanggungjawaban atas kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban terhadap apa yang dikerjakan di suatu organisasi. Pengertian akuntabilitas ini memberikan suatu petunjuk sasaran pada hampir sama reformasi sektor publik dan mendorong pada munculnya tekanan untuk pelaku kunci yang terlibat untuk bertanggungjawab dan untuk menjamin kinerja pelayanan publik yang baik. Oleh karena itu, semakin akuntabel suatu pemerintahan dalam mempertanggungjawabkan penyelenggaraan kegiatan pemerintah akan berpengaruh terhadap meningkatnya kinerja pemerintah daerah.

**H<sub>3</sub> : Akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja OPD**

### **Pengaruh Kapasitas Individu terhadap Kinerja OPD**

Kapasitas individu adalah kesanggupan atau kemampuan yang berarti bahwa seseorang yang memiliki kemampuan atau kesanggupan untuk mengerjakan sesuatu yang diwujudkan melalui tindakannya untuk meningkatkan produktifitas kerja. Terkait dalam proses penganggaran, maka individu yang memiliki pendidikan, pengetahuan, pelatihan, dan pengalaman akan mampu mengalokasikan sumber daya secara optimal, dengan demikian dapat mempermudah kinerja aparat OPD.

**H<sub>4</sub> : Kapasitas individu berpengaruh positif terhadap kinerja OPD**

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian jenis penelitian kausal komparatif (*casual-comparative research*), yaitu penelitian dengan bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab-akibat serta pengaruh antara dua individual atau lebih. Penelitian ini berusaha menjelaskan pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik, dan kapasitas individu sebagai variabel independen terhadap kinerja OPD sebagai variabel dependen . Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena pendekatan ini menitik beratkan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Populasi dari penelitian ini adalah OPD Kota Surabaya.

### **Teknik Pengambilan Sampel**

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel merupakan cara peneliti mengambil sampel atau contoh *representative* dari populasi yang tersedia (Sanusi, 2011:88). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* digunakan



karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan peneliti (Sekaran, 2006). Berikut kriteria sampel yang telah ditentukan oleh peneliti: (1) dinas/ badan yang terdaftar dalam [www.surabaya.co.id](http://www.surabaya.co.id); (2) kepala dinas/ badan dan staff di bagian keuangan OPD Kota Surabaya; (3) bekerja di dinas/ badan tersebut lebih dari lima tahun; (4) staff pemerintahan yang ikut serta secara langsung dalam penyusunan anggaran tersebut.

### **Teknik Pengambilan Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek merupakan jenis data penelitian berupa opini, sikap, pengalaman, atau karakteristik seseorang atau kelompok orang yang menjadi subjek penelitian.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data diperoleh langsung dari responden yang menjadi sasaran penelitian yang berisikan daftar pertanyaan terstruktur yang ditunjukkan kepada responden.

Penelitian ini menggunakan cara dengan metode survei untuk mengumpulkan data yang dimana metode pengumpulan data yang menggunakan kuisisioner. Pengumpulan data dengan cara metode survei ini merupakan peneliti atau pengumpul data mengajukan pertanyaan kepada responden baik dalam bentuk lisan maupun tertulis.

### **Variabel dan Definisi Operasional Variabel**

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik dan kapasitas individu. Sedangkan variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja OPD.

### **Variabel Operasional Variabel**

#### **Partisipasi Penyusunan Anggaran**

Partisipasi penyusunan anggaran adalah partisipasi manajerial OPD dalam proses penganggaran daerah, seperti program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, keikutsertaan dalam menentukan dalam menentukan target dan anggaran dan sebagainya. Terdapat 4 indikator menurut (Bangun, 2009) yang menjadi acuan dalam pembuatan kuisisioner, yaitu: (1) Melibatkan bawahan dalam penyusunan anggaran; (2) Memberikan informasi dalam penyusunan anggaran; (3) Kontribusi bawahan dalam anggaran OPD; (4) Memberi kesempatan bawahan ikut dalam penyusunan anggaran.

#### **Kejelasan Sasaran Anggaran**

Kejelasan sasaran anggaran merupakan alat untuk mengukur sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran itu dipahami oleh pegawai yang bertanggung jawab atas anggaran. Terdapat 7 indikator yang mempengaruhi kejelasan sasaran anggaran yaitu: (1) Tujuan; (2) Kinerja; (3) Standart; (4) Jangka Waktu; (5) Sasaran Prioritas; (6) Tingkat Kesulitan; (7) Koordinasi.

#### **Akuntabilitas Publik**

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Terdapat empat indikator yang mempengaruhi akuntabilitas publik yaitu: (1) Akuntabilitas Proses; (2) Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum; (3) Akuntabilitas Program; (4) Akuntabilitas Kebijakan.

### Kapasitas Individu

Kapasitas individu terbentuk dari proses pendidikan secara umum baik melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman seseorang. Pendidikan dan pelatihan merupakan investasi sumber daya manusia yang dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja, sehingga dapat meningkatkan kinerja seseorang. Terdapat tiga indikator yang mempengaruhi kapasitas individu yaitu: (1) Pendidikan; (2) Pelatihan; (3) Pengalaman.

### Kinerja OPD

Kinerja dapat diartikan sebagai hasil dari proses aktivitas manajerial yang efektif mulai dari proses perencanaan dan penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.

### Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan penyederhanaan data kedalam bentuk yang mudah di baca dan diinterpretasikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode analisis yang dimana diperhitungkan menggunakan SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) bertujuan untuk menentukan pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik dan kapasitas individu terhadap kinerja OPD.

### Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum terhadap objek yang diteliti, statistik deskriptif digunakan untuk mendiskusikan suatu data yang menunjukkan hasil pengukuran rata - rata (*mean*), standar deviasi (*standard deviation*), dan maksimum-minimum. Pengujian ini dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan dari sampel dan untuk mempermudah memahami variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian.

**Tabel 1**  
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PPA	72	3.50	5.00	4.1992	.37238
KSA	72	3.57	5.00	4.2361	.33298
AKP	72	3.44	4.89	4.2728	.32287
KI	72	3.60	4.80	4.2861	.29036
OPD	72	3.25	5.00	4.2153	.37130
Valid (listwise)	72				

Sumber: Kuisisioner 2019, diolah

Berdasarkan hasil uji deskriptif pada tabel 1 menunjukkan bahwa variabel partisipasi penyusunan anggaran kualitas jawaban minimum responden sebesar 3,50, maksimum sebesar 5, dengan nilai rata-rata 4,1992, dan nilai standar deviasi sebesar 0,37238. Variabel kejelasan sasaran anggaran menunjukkan nilai minimum sebesar 3,57, maksimum sebesar 5, dengan nilai rata-rata 4,2361, dan nilai standar deviasi sebesar 0,33298. Variabel akuntabilitas publik menunjukkan nilai minimum sebesar 3,44, maksimum sebesar 4,89, dengan nilai rata-rata sebesar 4,2728 dan nilai standar deviasi sebesar 0,32287. Variabel kapasitas individu menunjukkan nilai minimum 3,60, maksimum sebesar 4,80, dengan nilai rata-rata sebesar 4,2861 dan nilai standar deviasi sebesar 0,29036. Variabel organisasi perangkat daerah menunjukkan nilai minimum sebesar 3,25, maksimum 5, dengan nilai rata-rata 4,2153 dan nilai standar deviasi sebesar 0,37130.

### Uji Kualitas Data

#### Uji Validitas Data

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat - tingkat kevalidan atau keabsihan suatu instrumen atau pernyataan yang terdapat pada kuisisioner. Suatu instrumen

atau pernyataan yang valid mempunyai validitas yang tinggi. Dasar validitas yang digunakan untuk pengujian hipotesis menurut Ghozali (2011:53) adalah :

- a. Jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$ , maka pernyataan tersebut dinyatakan valid.
- b. Jika  $r_{hitung} < r_{tabel}$ , maka pernyataan tersebut dinyatakan tidak valid.

### Uji Reliabilitas

Uji reabilitas dilakukan guna untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana jawaban dari kuisisioner tersebut memiliki kesamaan atau konsistensi yang digunakan pada waktu yang berbeda. Uji pengukuran reabilitas penelitian ini menggunakan koefisien *cronbach's alpha*. Menurut Ghozali (2005: 42) menyatakan bahwa jika nilai koefisien *alpha* lebih besar dari 0,60 maka disimpulkan bahwa konstruk atau variabel penelitian tersebut dapat dikatakan handal dan reliabel.

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2005: 110) Dengan melihat normal *probabilty plot* dengan membandingkan distribusi komulatif dan distribusi normal adalah salah satu cara untuk menguji apakah distribusi normal atau tidak. Untuk menguji model regresi variabel yang diteliti apakah berdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan *One Sample Kolmogrov-smirnov* dengan ketentuan sebagai berikut : (1) Jika probabilitas  $>0,05$  maka distribusi dari model regresi adalah normal; (2) Jika probabilitas  $<0,05$  maka distribusi dari model regresi adalah tidak normal.

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Normalitas**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		72
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	121.722.252
Most Extreme Differences	Absolute	.066
	Positive	.046
	Negative	-.066
Kolmogorov-Smirnov Z		.563
Asymp. Sig. (2-tailed)		.909

a. Test distribution is Normal

b. Calculated from data

Sumber : Kuisisioner 2019, diolah

### Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas didalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (bebas). Apabila telah diuji dan ditemukannya terjadi korelasi maka terdapat *problem multikolinieritas*. Untuk mengetahui apakah terjadi *problem multikolinieritas* atau tidak yaitu dengan melihat besaran VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *tolerance*. Apabila angka *tolerance* dari satu model regresi kurang  $<0,1$  serta VIF  $>10$  hal tersebut berarti terdapat *problem multikolinieritas*.

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

Model	Coefficient <sup>a</sup>	
	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
PPA	0,262	6,25
KSA	0,241	4,44
AKP	0,855	1,17
KI	0,231	4,33

Sumber: Kuisisioner 2019, diolah

### Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik dan kapasitas individu terhadap kinerja OPD Kota Surabaya. Data yang diperoleh dan diolah dengan menggunakan bantuan komputer program SPSS, maka dihasilkan persamaan regresi linear berganda yang dapat dilihat pada tabel 4:

**Tabel 4**  
**Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
		1	(Constant)	4.194		
	PPA	.665	.268	1.001	2.480	.016
	KSA	.779	.316	1.220	2.465	.016
	AKP	.127	.055	.248	2.288	.025
	KI	.659	.213	.645	3.096	.003

a. Dependent Variable: OPD

Sumber: Kuisisioner 2019, diolah

Berdasarkan tabel 4 di atas dapat dibentuk persamaan regresi linear berganda yaitu

$$KA = 4,194 + 0,665 PPA + 0,779 KSA + 0,127 AKP + 0,659 KI$$

### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mencari seberapa besar variasi variabel independen dapat menjelaskan secara keseluruhan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen secara keseluruhan terhadap naik turunnya variasi nilai variabel dependen.

Nilai  $R^2$  berkisar antara 0 dan 1 ( $0 \leq R^2 \leq 1$ ). Semakin besar nilai  $R^2$ , maka semakin besar variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel independen. Sebaliknya, makin kecil nilai  $R^2$ , maka semakin kecil variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen.

**Tabel 5**  
**Hasil Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.573 <sup>a</sup>	.328	.288	125.303

Sumber: Kuisisioner 2019, diolah

### Uji Goodness Of Fit (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji kelayakan model penelitian. Model dapat dikatakan layak, apabila hasil pengolahan data yang dihasilkan dengan bantuan SPSS nilai signifikansinya < 0,05. Sehingga dapat diketahui apakah model termasuk dalam kategori cocok (*fit*) atau tidak. Berikut hasil uji F dapat dilihat pada tabel 6:

Tabel 6  
Hasil Uji F  
ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	51.415	4	12.854	8.187	.000 <sup>a</sup>
	Residual	105.196	67	1.570		
	Total	156.611	71			

a. Predictors: (Constant), AK, TP, PW, PA

b. Dependent Variable: KA

Sumber : Kuisisioner 2019, diolah

### Uji Hipotesis (Uji T)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Cara melakukan uji t adalah dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 ( $\alpha=5\%$ ) (Ghozali, 2011). Ketentuan penerimaan dan penolakan hipotesis adalah sebagai berikut:

- Jika nilai signifikansi  $t \leq 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.
- Jika nilai signifikansi  $t > 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 7  
Hsil Uji t  
Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstadrized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,194	2,524		1,661	0,101
	PPA	0,665	0,268	1,001	2,48	0,016
	KSA	0,779	0,316	1,22	2,465	0,016
	AKP	0,127	0,055	0,248	2,288	0,025
	KI	0,659	0,213	0,645	3,096	0,003

a. Dependent Variable: KA

Sumber: Kuisisioner 2019, diolah

### Pembahasan

#### Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja OPD

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas partisipasi penyusunan anggaran terhadap variabel terikat kinerja aparat. Berdasarkan hasil uji hipotesis diketahui nilai signifikansi sebesar  $0,016 < 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_1$  yang menyatakan partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran dapat diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nurhalima (2013) yang menyatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial OPD. Adanya partisipasi OPD dalam proses penyusunan anggaran pemerintah daerah adalah menunjukkan pada besar tingkat keterlibatan OPD yang terlibat dalam proses penganggaran daerah, diberi kesempatan untuk ambil bagian dalam pengambilan keputusan melalui negosiasi terhadap anggaran.

Hal ini didasari pemikiran bahwa ketika satu tujuan atau sasaran yang dirancang secara partisipatif disetujui, maka para penyusun akan mempertanggungjawabkan dan memiliki rasa yang sungguh-sungguh untuk mencapainya. Jadi, dengan adanya bawahan ikut serta dalam proses penyusunan anggaran atau partisipasi dalam penyusunan anggaran, para bawahan tersebut akan merasa puas, produktif dan dihargai oleh suatu organisasi, dengan begitu partisipasi anggaran mampu membentuk sikap, perilaku karyawan dan dapat memunculkan rasa memiliki terhadap organisasi serta menumbuhkan pengaruh motivasional terhadap tujuan anggaran.

Hal ini sesuai dengan teori Bambang Sardjito dan Osmad Muthaher (2007) penyusunan anggaran perlu melibatkan manajemen pada level yang lebih rendah sehingga anggaran partisipatif dapat dinilai sebagai pendekatan manajerial yang dapat meningkatkan kinerja setiap anggota organisasi sebagai individual karena dengan adanya partisipasi dalam penyusunan anggaran diharapkan setiap individu mampu meningkatkan kinerjanya sesuai dengan target yang telah ditentukan.

### **Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja OPD**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas kejelasan sasaran anggaran terhadap variabel terikat kinerja aparat pemerintah. Berdasarkan hasil uji hipotesis diketahui nilai signifikansi sebesar  $0,016 < 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_2$  yang menyatakan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran dapat diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suwandi (2013), bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. Semakin baik kejelasan sasaran anggaran maka kinerja pemerintah yang dihasilkan oleh pemerintah juga akan semakin meningkat. Hal ini konsisten dengan teori yang dinyatakan oleh Suwandi (2013) yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran tersebut.

Hal ini menegaskan dengan adanya sasaran anggaran yang jelas diharapkan aparat pemerintah daerah dalam hal ini masing-masing OPD mampu meningkatkan kinerjanya sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi secara keseluruhan dengan adanya kejelasan sasaran anggaran mengacu pada anggaran yang telah dibuat dan dapat dimengerti secara jelas dan spesifik sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya berdampak baik terhadap kinerja atau aktivitas manajerial dari aparat itu sendiri.

### **Pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja OPD**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas akuntabilitas publik terhadap variabel terikat kinerja aparat pemerintah. Berdasarkan hasil uji hipotesis diketahui nilai signifikansi sebesar  $0,025 < 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_3$  yang menyatakan akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran dapat diterima.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Putra (2013) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. Hal ini sesuai dengan teori Mardiasmo (2002) yang menyatakan bahwa akuntabilitas publik merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti proses penganggaran dimulai dari perencanaan,

penyusunan, pelaksanaan yang harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketika pertanggungjawaban dalam menjalankan program atau kegiatan pemerintah daerah baik maka kinerja aparat pemerintah daerah juga ikut baik. Hal ini didasari bahwa dalam menjalankan tugasnya, pemerintah daerah kota Surabaya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas.

### **Pengaruh Kapasitas Individu terhadap Kinerja OPD**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas partisipasi anggaran terhadap variabel terikat kinerja aparat. Berdasarkan hasil uji hipotesis diketahui nilai signifikansi sebesar  $0,003 < 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_4$  yang menyatakan partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran dapat diterima.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Asrini (2017) menyatakan bahwa kapasitas individu berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah yaitu dengan memberikan bukti yang kuat bahwa kapasitas individu kepala bagian/ bidang dapat meningkatkan kinerja aparatur pemerintah. Hal ini sesuai dengan teori Barney (2009) kepemilikan atas sumber daya yang bernilai akan menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Kapasitas individu terbentuk dari proses pendidikan secara umum, baik melalui pendidikan formal, nonformal dan informal. Individu yang berkualitas adalah individu yang memiliki pengetahuan. Terkait dalam proses penganggaran, maka individu yang memiliki cukup pengetahuan akan mampu mengalokasikan sumber daya secara optimal.

## **Simpulan dan Saran**

### **Simpulan**

Penelitian ini dilakukan untuk menguji partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik, dan kapasitas individu terhadap kinerja aparat instansi pemerintah daerah di OPD Kota Surabaya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan beberapa uji yang telah dijelaskan pada halaman sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa: (1) Hasil penelitian ini menyatakan partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran bahwa semakin kuat dan tinggi akuntabilitas pemerintah maka akan semakin berpengaruh baik terhadap hasil kinerja anggaran pemerintah; (2) Hasil penelitian ini menyatakan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran bahwa semakin kuat dan tinggi transparansi pemerintah maka akan semakin berpengaruh baik terhadap hasil kinerja anggaran pemerintah; (3) Hasil penelitian ini menyatakan akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran bahwa semakin kuat dan tinggi pengawasan pemerintah maka akan semakin berpengaruh baik terhadap hasil kinerja anggaran pemerintah; (4) Hasil penelitian ini menyatakan kapasitas individu berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran bahwa semakin kuat dan tinggi partisipasi anggaran pemerintah maka akan semakin berpengaruh baik terhadap hasil kinerja anggaran pemerintah.

### **Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan pada penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa saran yang dapat disampaikan peneliti, antara lain: (1) Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya dapat menambahkan variabel-variabel lain yang masih mempengaruhi kinerja anggaran instansi pemerintah daerah, serta dapat menambah jumlah sampel dalam penelitian agar data yang dihasilkan lebih akurat; (2) Penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas obyek penelitian, tidak hanya pada OPD Kota Surabaya melainkan dengan memperluas ruang lingkup provinsi dan memperbanyak sampel penelitian; (3) Untuk peneliti selanjutnya hendaknya melakukan wawancara kepada responden untuk meningkatkan pemahaman

terhadap jawaban responden dan data yang diperoleh jelas dan valid; (4) Penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas obyek penelitian, tidak hanya pada OPD Kota Surabaya melainkan dengan memperluas ruang lingkup provinsi dan memperbanyak sampel penelitian; (5) Untuk peneliti selanjutnya hendaknya melakukan wawancara kepada responden untuk meningkatkan pemahaman terhadap jawaban responden dan data yang diperoleh jelas dan valid.

### Daftar Pustaka

- Anggi. 2017. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran, Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Desentralisasi Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Surabaya
- Asrini. 2017. Pengaruh Akuntabilitas Kejelasan Sasaran Anggaran Partisipasi Penyusunan Anggaran dan kapasitas individu Terhadap Kinerja SKPD di Pemerintah Kota Palu, *Jurnal* 5(1):52-58
- Bangun, A. 2009. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi terhadap Kinerja Manajerial SKPD dengan Pengawasan Internal sebagai Variabel Moderating. *Tesis*. Universitas Sumatra Utara. Medan.
- Darlis, E.2002. Analisis Pengaruh Komitmen Organisasi Dan Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Hubungan antara Partisipasi Anggaran Dengan Senjangan Anggaran. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol.5:85-101
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi 3. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ikhsan, A dan M. Ishak. 2005. *Akuntansi Keperilakuan* . Salemba Empat. Jakarta
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pengembangan. 2008, *Akuntabilitas dan Good Governance*. LAN-RI. Jakarta.
- Ghozali, I. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Edisi Ketiga. Universitas Diponegoro. Semarang.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi Keempat. Universitas Diponegoro. Semarang.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Edisi Kelima. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta
- \_\_\_\_\_. 2009. *Akuntansi Sektor Publik* . Edisi keempat. Andi. Yogyakarta
- Mashun, Sulistiyowati, dan Andre . 2006. *Akuntansi sektor publik*. Fakultas Ekonomi UGM. Yogyakarta.
- Nurhalimah. 2013. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Aparatur Perangkat Daerah di Pemerintah Aceh. *Tesis*. Universitas Syiah Kuala. Aceh Darusalam.
- Putra, D. 2013. Pengaruh Akuntabilitas publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Padang. *Skripsi*. Universitas Negeri Padang. Padang.
- Sari, S.P. 2006. Pengaruh Kapasitas Individu yang Diinteraksikan dengan Locus of Control Terhadap Budgetary Slack. Surakarta. Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang.
- Sanusi,A. 2014. *Metode penelitian bisnis*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sekaran, U. 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta.
- Simanjuntak, P.J. 2011. Manajemen dan Evaluasi Kinerja. Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung.
- Suwandi, A.P. 2013. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Desentralisasi terhadap kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD pemerintah kota padang ). *Skripsi*. Universitas Negeri Padang. Padang.



- Syafrial. 2009. Pengaruh Ketepatan Skedul Penyusunan Anggaran , Kejelesan Sasaran Anggaran , dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah. *Tesis*. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Wulandari, N. 2013. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang ). *Skripsi* . Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang . padang.
- Yudha,E. 2013. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial: Komitmen Organisasi Dan Persepsi Inovasi Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Instansi Vertikal Wilayah Pembayaran Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara Sampit). *Skripsi* . Universitas Diponegoro.

